



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Hari/Tanggal	: Selasa, 17 November 2015
Masa Persidangan	: II
Jenis rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Rapat ke	:
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).
Waktu	: Pukul 14.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Membahas rencana peningkatan kewenangan BPOM; 2. Membahas Paket Stimulus Pemerintah terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan; 3. Penjelasan mengenai kebutuhan SDM di BPOM; 4. Pembahasan Pengawasan Tindak Lanjut Kasus Temuan BPOM yang sudah diserahkan kepada POLRI dan Kejaksaan; 5. Laporan mengenai Pengawasan Akhir Tahun BPOM.
Ketua Rapat	: Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/ Ketua Komisi IX DPR RI;
Sekretaris Rapat	: Muhammad Yus Iqbal, SE/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gd. Nusantara I DPR/MPR RI Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Hadir	: A. orang dari 50 Anggota Komisi IX DPR RI; B. Kepala Badan POM RI beserta jajaran;

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (Badan POM RI) dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.50 WIB, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendukung peningkatan kewenangan BPOM di bidang pengawasan obat dan makanan melalui pembentukan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.
2. Komisi IX DPR RI mengapresiasi upaya Pemerintah untuk melakukan *simplifikasi* layanan importasi bahan baku obat dan makanan, namun demikian BPOM RI tetap harus memperhatikan keamanan obat dan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
3. Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap penjualan obat-obatan secara *on line*.
4. Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk melaporkan indikator penurunan peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat.
5. Komisi IX DPR RI meminta BPOM RI untuk memperkuat kerjasama dengan lembaga penegak hukum, baik nasional maupun internasional, dalam rangka pencegahan dan penindakan peredaran obat dan makanan yang beresiko bagi kesehatan.
6. Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk meningkatkan sosialisasi program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta program BPOM yang berkaitan dengan pengawasan dengan melibatkan Komisi IX DPR RI.
7. Komisi IX DPR RI mendesak BPOM RI untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat, terutama menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

Rapat diakhiri pukul 16.55 WIB

KEPALA BADAN POM RI,



Dr. ROY A. SPARRINGA, M.App.Sc

KETUA RAPAT/
KETUA KOMISI IX DPR RI,



DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, ST.M.I.Pol
A-415